

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Abdul Hakim, 2014, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Anonim, 1978, *Simposium Hukum Perburuhan*, Cet. I, Badan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, Bina Cipta.
- Bagus Sarnawa, Johan Erwin, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan*, Yogyakarta, Laboratorium Hukum Universitas Yogyakarta.
- Budi Santoso, 2012, *Hukum Ketenagakerjaan Perjanjian Kerja Bersama*, Malang, Universitas Brawijaya Press.
- Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih, Moh Firdaus Sholihin, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hasibuan Nurmansyah, 1981, *Upah Tenaga Kerja dan Konsentrasi pada Sektor Industri*, Prisma.
- Ikhwan Fahroji, 2016, *Hukum Perburuhan Konsepsi, Sejarah, dan Jaminan Konstitusional*, Malang, Setara Press.
- Imam Soepomo, 1987, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta, Djambatan.
- Leli Joko S, Septi Nur W, Laras Astuti, dan Reni Budi S, 2014, *Pedoman Penulisan Hukum*, Yogyakarta, Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Muhadam Labolo, 2008, *Memahami Ilmu Pemerintah*, Jakarta, PT.Raja Grafindo.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Nazaruddin Malik, 2016, *Dinamika Pasar Tenaga Kerja Indonesia*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang Press.

Prayudi Atmodusirdjo, 1992, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Sayid Mohammad Rifqi Noval, 2017, *Hukum Ketenagakerjaan Hakikat Cita Keadilan dalam Sistem Ketenagakerjaan*, Bandung, PT. Refika Aditama.

Siagian, 2008, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Pertama)*, Jakarta: Binapura Aksara.

Suriansyah Murhaini, 2014, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Widodo, Suryandono, 2017, *Tenaga Kerja Asing Analisis Politik Hukum*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

WJS. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

#### **Jurnal:**

Agatha Jumiati, "Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial", *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. 9, No. 2 (Oktober, 2011).

Asri Wijayanti, "Menuju Sistem Hukum Perburuhan Indonesia yang Berkeadilan", *Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 3 (Desember 2013).

Erna Susanti. "Kebijaksanaan Pembinaan Industrial dalam Melindungi Pekerja untuk Menuju Terciptanya Kepastian Hukum Menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan", *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 4, No. 2 (Juni, 2008).

Khoirul, Hidayat, "Optimalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan di Kota Malang", *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 7, No. 2 (Desember, 2015).

Noviar, “Peranan Pemerintah Daerah dalam Memberikan Perlindungan terhadap Hak-hak Pekerja/buruh Terutama Berupa Pemenuhan Atas Upah yang Layak (Studi di Kabupaten Sanggau)”, *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol. 2, No 2 (September, 2016).

Payaman J. Simanjuntak, “Reformasi Sistem Pengupahan Nasional”, *Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2 (Januari, 2004).

Prijono Tjptiherijanto, “Perkembangan Upah Minimum dan Pasar Kerja”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 61, No. 4 (Desember, 1993).

Sholeh, Maimum, “Dampak Kenaikan Upah Minimum Provinsi Terhadap Kesempatan Kerja”, *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Vol. 2, No. 2 (Desember, 2002).

Sholeh Maimum, “Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja Serta Upah: Teori Serta Beberapa Potretnya di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Vol. 4, No. 1 (April, 2007).

Rini Sulistiawati, “Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia”, *Jurnal EKSOS*, Vol. 8, No. 3 (Oktober, 2012).

Zulkarnain Ibrahim, “Pengaturan Penegakan Hukum Pengupahan dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 22, No. 4 (Oktober, 2015).

#### **Berita Online:**

Yogi Anugrah, 2018, “54 Perusahaan di DIY Belum Bayar Buruh Sesuai UMK, Pemerintah Tak Berani Beri Sanksi”, Yogyakarta: [Harianjogja.com](http://Harianjogja.com). <https://bit.ly/2K6F4Ei> diakses pada tanggal 24 Oktober 2018 pukul 21:24 WIB.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

R.I., Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

R.I., Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

- R.I.,Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.
- R.I.,Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
- R.I.,Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 51 Tahun 2012 tentang Optimalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi dan Kota/Kabupaten.
- R.I.,Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahap Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.
- R.I.,Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.
- R.I.,Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2015 tentang Rincian Fungsi dan Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- R.I.,Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.
- R.I.,Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XIII/2015 dalam Penangguhan Upah Pekerja.
- R.I.,Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 223/KEP/2017 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2018.